



# Akuntabilitas Komitmen Indonesia Pada G20



...semakin melemah, negara-negara  
...dan regulasi yang diperlukan, termasuk  
...pertumbuhan dan memperkuat koordinasi di

Dr. Muhamad Chatib Basri  
( Menteri Keuangan Republik Indonesia )

Penyunting :

Irfa Ampri, Syurkani Ishak Kasim, Yulius Purwadi Hermawan

Diterbitkan Oleh:  
...Perubahan Iklim dan Multilateral  
...Fiskal, Kementerian Keuangan RI

ISBN 978-602-18738-1-8





# **Akuntabilitas Komitmen Indonesia Pada G20**

Penyunting  
Irfa Ampri, Syukani Ishak Kasim, Yulius Purwadi Hermawan

## **Akuntabilitas Komitmen Indonesia pada G20**

### **Penyunting**

Irfa Ampri  
Syurkani Ishak Kasim  
Yulius Purwadi Hermawan

### **Tim Penyusun**

Yulius Purwadi Hermawan  
Syurkani Ishak Kasim  
Irfa Ampri  
Elizabeth Tiur Manurung  
Ivantia Mokoginta  
Nanang Zaenal Arifin  
PC Suroso  
Rakhmindyarto  
Ratih Indraswari  
Regina P. Mboeik  
Rulyusa Pratikto  
Siwi Nugraheni  
Yanuarita Hendrani

## Akuntabilitas Komitmen Indonesia pada G20

Diterbitkan oleh : Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral  
Badan Kebijakan Fiskal,  
Kementerian Keuangan RI

Layout & Design Cover : Oktariany dan Denny

Cetakan Kesatu : Oktober, 2013

ISBN : 978-602-18738-1-6

Alamat : Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Gedung Radius Prawiro, Lantai 6  
Jl. Dr. Wahidin No. 1, Jakarta 10710  
Tel. : 021-34831678  
Fax. : 021-34831677  
Email : [G20indonesia@depkeu.go.id](mailto:G20indonesia@depkeu.go.id)

### Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

#### Pasal 44

- (1) Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

### *Disclaimer*

Dengan ini dinyatakan bahwa tulisan yang dimuat dalam buku ini tidak secara otomatis mewakili sikap dan pandangan resmi dari Kementerian Keuangan atau Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karenanya pertanggungjawaban atas isi tulisan tersebut sepenuhnya berada di tangan Tim Penyusun yang bersangkutan.

## DAFTAR ISI

Sambutan Menteri Keuangan RI	v
Sambutan Sherpa Indonesia untuk Forum G20	ix
Kata Pengantar Kepala Badan Kebijakan Fiskal	xi
Pernyataan dan Ucapan Terimakasih	xv
Daftar isi	xvii
Ringkasan Eksekutif	xxiii
Pendahuluan	1
Evaluasi Akuntabilitas dan Efektivitas G20 (Tinjauan Pustaka)	9
<b>Konsolidasi Fiskal dan Komitmen Indonesia pada G20</b>	<b>39</b>
<b>Peranan Perekonomian Indonesia terhadap</b>	
<b>Ketidakseimbangan Global</b>	<b>53</b>
<b>Stimulasi Reformasi Struktural</b>	<b>69</b>
<b>Kontribusi Indonesia pada Lembaga Keuangan</b>	
<b>Internasional</b>	<b>93</b>
Reformasi Regulasi Keuangan	107
Penghindaran Kebijakan Proteksionis	135
Pembatasan Subsidi Bahan Bakar Fosil dan Peningkatan Efisiensi Energi	149
Pembangunan Infrastruktur	165
Pelaksanaan Program Keuangan Inklusif di Indonesia	191
Penyediaan <i>Official Development Assistance</i>	203
Kesimpulan dan Rekomendasi	225

### Lampiran:

Apendiks I. Indikator-indikator Pemenuhan Komitmen Individual, IORI Higher School of Economics, National Research University dan Munk School of Global Affairs, Universitas Toronto	240
Apendik II. Indikator-indikator Pemenuhan Komitmen dalam Pembangunan, IORI Higher School of Economics, National Research University dan Munk School of Global Affairs, Universitas Toronto	242
Apendik III. Tujuan dan Prioritas G20 di bawah Kepemimpinan Rusia	245

### Daftar Tabel

Tabel 1	Rekap Skorsing Penurunan Komitmen Indonesia	xxxiv
Tabel 2.1.	Metode Pengukuran Pemenuhan Komitmen Anggota G20	34
Tabel 3.1.	Program-program yang Didanai oleh DAK	46
Tabel 4.1.	Hasil Uji Akar Unit Philips-Perron	62
Tabel 4.2.	Hasil Uji Kointegrasi Johansen Model Investasi	62
Tabel 5.1.	Current Account/GDP dan Public Debt/GDP Negara-negara Anggota G20 Tahun 2012	77
Tabel 5.2.	<i>Ease of Doing Business</i> di negara-negara G20	87
Tabel 6.1.	Penyertaan Modal Negara pada Lembaga Keuangan Internasional (per 31 Desember 2012)	97
Tabel 6.2.	Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/ Lembaga Keuangan Internasional 2012-2013	98
Tabel 6.3.	Penyertaan Modal Negara Lainnya 2012-2013	99
Tabel 6.4.	Jumlah Angsuran General Capital Increase Indonesia (Total 5 Tahun Angsuran)	101
Tabel 7.1.	Perkembangan Implementasi Basel II di Indonesia	110
Tabel 7.2.	Rekomendasi G20/FSB terhadap <i>Hedge Funds</i> di Indonesia	127
Tabel 9.1.	Proteksi Perdagangan di Negara-negara G20 tahun 2008 - 2012	143
Tabel 9.2.	Peringkat Negara-negara Anggota G20 dalam Menjaga Komitmennya Menurunkan Tindakan Proteksionisme periode Oktober 2008 - Oktober 2012	145
Tabel 11.5.	Proyek dalam Proses Transaksi	174
Tabel 11.6.	Proyek yang ditawarkan	175
Tabel 11.7.	Proyek Prioritas	176



Tabel 11.8.	Proyek Potensial	178
Tabel 11.9.	Penyertaan Modal Indonesia pada ASEAN Infrastructure Fund (AIF)	182
Table 11.10.	Kontribusi Negara ASEAN - 6 dalam IAI Work Plan I	183
Tabel 13.1.	Rekapitulasi Pendanaan Kegiatan KSS Indonesia Periode tahun 2000-2010	213
Tabel 13.2.	Rekapitulasi Anggaran Kegiatan Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular Seluruh Kementerian dan Lembaga terkait 2013-2015	215
Tabel 13.3.	Rekapitulasi Anggaran Kegiatan Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular di Masing-masing Kementerian 2013-2015	216
Tabel 14.1.	Rekap Skoring Pemenuhan Komitmen Indonesia	231

## Daftar Grafik

Grafik 3.1.	Penduduk Miskin di Perkotaan dan Pedesaan (%)	42
Grafik 3.2.	Perkembangan Surat Berharga Negara dan Utang Luar Negeri	48
Grafik 4.1.	Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran AS2001 - 2011	54
Grafik 4.2.	Defisit Anggaran terhadap PDB dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2004 - 2011	56
Grafik 4.3.	IRF Model Perdagangan	64
Grafik 4.4.	IRF Ekspansi Model Perdagangan	65
Grafik 4.5.	IRF Model Investasi	66
Grafik 5.1.	Global Imbalances 1996 -2008	70
Grafik 5.2.	Neraca Berjalan Indonesia (dalam juta US\$)	79
Grafik 5.3.	Investasi dalam Infrastruktur dan <i>Gross Fixed Investment</i> dalam Persentase terhadap GDP	80
Grafik 5.4.	Anggaran Infrastruktur, Nominal dalam triliun Rp (skala kiri) dan % terhadap Belanja Negara (skala kanan)	81
Grafik 5.5.	Realisasi Anggaran Belanja Infrastruktur (Trilyun Rupiah)	81
Grafik 5.6.	Anggaran Infrastruktur, Nominal dalam triliun Rp (skala kiri) dan % terhadap Belanja Negara (skala kanan)	82
Grafik 5.7.	Persentasi Alokasi Anggaran Pemerintah untuk Pendidikan	83
Grafik 5.8.	Anggaran Pemerintah Pusat untuk Pendidikan	83
Grafik 5.9.	Jumlah pekerja berdasarkan tingkat pendidikan (Juta orang)	84
Grafik 5.10.	Total Pekerja, Pekerja Sektor Formal dan Pekerja Sektor Informal (dalam %)	85
Grafik 5.11.	Pengangguran Terbuka dan Pekerja Tidak Penuh (Juta orang)	86

Grafik 10.1.	Produk Domestik Bruto (dalam USD yang disesuaikan dengan PPP) Negara-negara G20 untuk setiap energi setara 1 Kg minyak (tahun 2010 dan 2011)	154
Grafik 10.2.	Tingkat Subsidi BBM Sembilan Negara G20 (% dari Total Biaya Produksi)	156
Grafik 11.1.	Perkembangan Anggaran Infrastruktur 2007-2013	167

#### **Daftar Gambar**

Gambar 7.1.	Roadmap Konvergensi IFRS	118
-------------	--------------------------	-----

#### **Daftar Diagram**

Diagram 10.1.	Sumber Energi di Indonesia, tahun 2012	153
---------------	--	-----



## Konsolidasi Fiskal dan Komitmen Indonesia pada G20<sup>29</sup>

### I. Pendahuluan

Kebijakan konsolidasi fiskal dipandang sangat mendesak untuk mengatasi krisis keuangan global. Para pemimpin pemerintahan negara anggota G20 telah memberi perhatian besar bagi terciptanya konsolidasi fiskal di negara-negara anggota G20 sejak KTT pertama di Washington (November 2008). Perhatian yang lebih besar dikemukakan kembali dalam KTT G20 di London (April 2009), Pittsburgh (September 2009) dan secara eksplisit terutama di Toronto (Juni 2010). Komitmen ini meliputi upaya pengurangan defisit anggaran dan stabilisasi ataupun pengurangan rasio utang pemerintah terhadap PDB, yang diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi pasca krisis dan sekaligus membangun struktur ekonomi nasional dan internasional yang tahan krisis di masa yang akan datang. Konsolidasi fiskal dipandang sangat penting untuk menciptakan *global rebalancing*.

Pemerintah Indonesia juga memberikan perhatian besar terhadap komitmen konsolidasi fiskal ini. Sejak krisis ekonomi global tahun 2008-2009, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia berdampak negatif dengan penurunan tajam. Turunnya tingkat laju pertumbuhan ekonomi, berdampak pada peningkatan *debt-GDP ratio* dari 30.1% pada tahun 2008 menjadi 31.8% pada tahun 2009 (Bank Indonesia, 2012, hal. 3). Upaya untuk mengeluarkan Indonesia dari dampak krisis ekonomi global mendorong pemerintah untuk menjalankan kebijakan fiskal ekspansif melalui pemberian stimulus ekonomi dalam bentuk program subsidi dan bantuan sosial.

---

<sup>29</sup> Draft awal analisis pemenuhan komitmen dalam aspek konsolidasi fiskal disusun oleh Ivantia Monkoginta



Hal ini berdampak pada naiknya rasio defisit anggaran pemerintah terhadap PDB dan sekaligus menempatkan Indonesia pada peringkat ke-17 sebagaimana ditunjukkan oleh indikator rasio anggaran-PDB dan utang-PDB yang masih di bawah komitmen yang dibuat sebagai anggota G20.<sup>30</sup>

Kajian bidang ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai strategi yang telah dijalankan oleh pemerintah Indonesia untuk mengejar komitmennya di tengah-tengah upaya untuk mengatasi krisis ekonomi global yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Pembahasan makalah ini akan dilihat dari sisi pengeluaran, penerimaan dan pembiayaan pengeluaran pemerintah. Dari sisi pengeluaran, akan dilihat upaya pemerintah untuk mengatasi dampak negatif krisis ekonomi sekaligus mengefisiensikan pengeluaran yang dilakukan. Sementara dari sisi pembiayaan, akan dijelaskan strategi pemerintah dalam hal pengelolaan utang yang lebih baik.

## II. Program Pengentasan Kemiskinan

Sejak krisis ekonomi 2008, pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pengentasan kemiskinan dan bantuan sosial. Pada tahun 2012, program tersebut terbagi dalam lima tema besar; yaitu (1) peningkatan dan penyempurnaan kualitas kebijakan perlindungan sosial berbasis kualitas, (2) penyempurnaan dan peningkatan efektifitas pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), (3) peningkatan akses usaha mikro dan kecil kepada sumberdaya produktif, (4) peningkatan dan perluasan program-program pro-rakyat dan (5) peningkatan sinkronisasi dan efektivitas koordinasi penanggulangan kemiskinan serta

<sup>30</sup> Lihat hasil kajian IORI, National Research University, Rusia dan Munk School of Global Affairs, Universitas Toronto, Kanada. *Tracking Progress on the G20 Development Commitments*, Januari 2013, hal. 19.

harmonisasi antar pelaku. Total dana yang disediakan pada tahun 2012 sebesar Rp. 50.9 trilyun (Kementerian Keuangan, 2012, hal. 117).

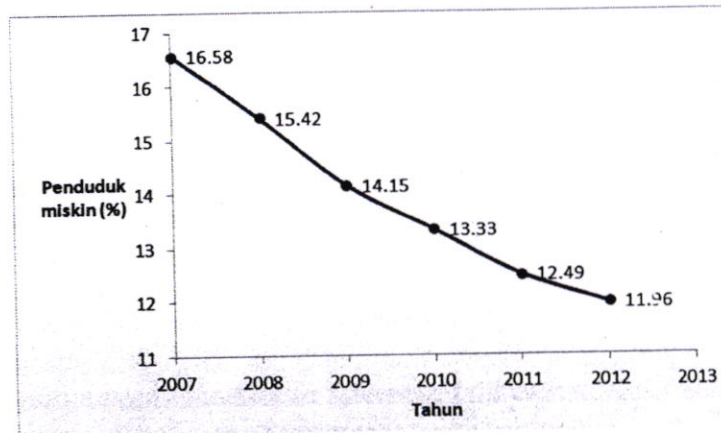
Dana bantuan sosial pada tahun 2012 telah dikurangi sebesar 22.3 persen dibandingkan tahun 2011 (Kementerian Keuangan, 2012, Bab, hal. 215). Beberapa program pengentasan kemiskinan yang didanai melalui dana bantuan sosial pada tahun 2012 antara lain (Kementerian Keuangan 2012, hal. 215):

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) seperti PNPM Perdesaan, PNPM Perkotaan, PNPM Peningkatan Infrastruktur Perdesaan (program pengembangan kecamatan), PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus dan PNPM Sosial Ekonomi Wilayah dengan alokasi dana sebesar 12,3 trilyun Rupiah.
2. Bantuan program bidang kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya serta rumah pemerintah sakit kelas III atau swasta yang ditunjuk oleh pemerintah melalui program Jamkesmas dengan alokasi dana sebesar 5,9 trilyun Rupiah.
3. Bantuan program bidang pendidikan, Bantuan Operasional Sekolah, yang menyediakan dana beasiswa untuk siswa dan mahasiswa miskin dengan alokasi dana sebesar 9,1 trilyun Rupiah.
4. Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat miskin melalui kaum Ibu dengan mendorong anaknya agar sehat dan tetap dapat bersekolah dengan alokasi dana sebesar 2,1 trilyun Rupiah.

Walaupun program-program tersebut membebani anggaran belanja pemerintah pusat, tetapi telah berhasil mengatasi masalah kemiskinan sebagai dampak dari krisis ekonomi global. Hal ini terlihat dari menurunnya persentase angka kemiskinan sebagaimana ditunjukkan dalam Grafik 3.1.



**Grafik 3.1. Penduduk Miskin di Perkotaan dan Pedesaan (%)**



Sumber: Badan Pusat Statistik, n.d<sup>a</sup>

### III. Pemberian Subsidi atas Kelompok Barang Tertentu

Selama periode 2007-2012, kelompok energi menerima porsi subsidi yang cukup besar dibandingkan dengan kelompok non-energi. Sebagai gambaran, pada tahun 2007, subsidi kelompok energi mencapai 77,80 persen dari total subsidi Pemerintah. Angka ini meningkat menjadi 82,57 persen pada tahun 2012. Sebaliknya, porsi subsidi kelompok non-energi menurun dari 22,2 persen menjadi 17,43 persen pada periode yang sama (Kementerian Keuangan, 2013, hal. 55).

Penerapan *administered price* pada kelompok energi seperti BBM, LPG dan Tarif Dasar Listrik melalui subsidi dibutuhkan untuk mengurangi gejolak inflasi. Gejolak inflasi ini pada akhirnya akan berakibat pada penurunan daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah Indonesia cenderung sangat berhati-hati untuk menghapuskan subsidi agar tidak bersifat *counter productive* terhadap berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah memberikan hasil.

### IV. Tuntutan Desentralisasi Fiskal dan Beban APBN

Sejak tahun 2001, pemerintah Indonesia telah menjalankan kebijakan desentralisasi fiskal. Kebijakan ini dijalankan dengan menggunakan skema transfer dana pusat-daerah yang disebut sebagai Dana Perimbangan yang terbagi dalam:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) yang dijalankan untuk memperbaiki kesenjangan vertikal. Pengalokasian dana ini mengikuti teknik penghitungan tertentu dengan memperkenalkan komponen-komponen yang bersifat *lump-sum* atau non-formula dan yang bersifat formula dalam pengalokasiannya.
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikeluarkan untuk membiayai program-program pembangunan di daerah yang menjadi prioritas nasional tetapi pembiayaan atas program-program ini akan membebani anggaran daerah.
3. Dana Bagi Hasil (DBH) yang merupakan bagi hasil pusat-daerah atas penghasilan dalam negeri seperti pajak dan non-pajak. Dana ini dikeluarkan untuk mengatasi masalah kesenjangan vertikal pusat-daerah. Berdasarkan teknik penghitungan Dana Perimbangan menurut UU 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perkembangan beban dana Perimbangan terhadap Total Pengeluaran Pemerintah berada pada kisaran 30 persen. Besarnya tekanan yang disebabkan oleh antara lain faktor-faktor di atas tanpa diimbangi oleh



peningkatan penerimaan dalam negeri yang memadai menyebabkan terjadinya defisit anggaran. Defisit ini ditutupi oleh pembiayaan dalam dan luar negeri. Dari sisi risiko, pembiayaan luar negeri dapat memberikan beban tambahan pada anggaran karena adanya fluktuasi nilai tukar yang berdampak terhadap jumlah nominal cicilan dan bunga utang dalam satuan mata uang Rupiah. Salah satu penyebab tingginya rasio tersebut adalah mata uang Rupiah yang terdepresiasi secara signifikan terhadap USD.

## V. Upaya Pemerintah untuk Mengurangi Tekanan pada APBN

Dari sisi pengeluaran, pemerintah telah mengambil beberapa strategi untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah. Strategi-strategi tersebut adalah:

### V. 1 Pengurangan subsidi BBM secara bertahap.

1. Upaya konversi penggunaan minyak tanah ke LPG. Hal ini dilakukan mengingat bahwa (ESDM, 2010):
  - a. Biaya produksi tanpa subsidi untuk LPG lebih murah daripada minyak tanah. Akibatnya, pemerintah harus mengeluarkan 2.500 Rupiah per liter subsidi lebih besar untuk memproduksi minyak tanah dibandingkan dengan LPG. Adanya program konversi ini diharapkan dapat menghemat pengeluaran subsidi tersebut.
  - b. Pemberian subsidi dirasakan tidak tepat sasaran. Sebagai gambaran, pada tahun 2010, sekitar 70 persen pengguna minyak tanah berasal dari golongan menengah dan mampu. Sementara 20 persen saja pengguna minyak tanah berasal dari golongan miskin.

2. Upaya pengurangan subsidi bahan bakar kendaraan bermotor.
  - a. Himbauan kepada masyarakat khususnya yang berasal dari golongan ekonomi menengah ke atas agar beralih ke bahan bakar kendaraan bermotor tanpa subsidi.
  - b. Rencana pengurangan subsidi bahan bakar melalui peningkatan harga jual bahan bakar kendaraan bermotor bersubsidi secara bertahap.
3. Pengurangan subsidi Tarif Daftar Listrik (TDL) secara bertahap dan pengalihan dana subsidi untuk mendanai program pembangunan lain. Untuk tahun anggaran 2013, subsidi TDL akan dipangkas sebesar 11,8 trilyun Rupiah. Selanjutnya dana ini akan dialihkan untuk pengembangan infrastruktur dan peningkatan ketahanan pangan dan energi (Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, 2012).

### V.2 Pembenahan alokasi anggaran pemerintah pusat melalui penyempurnaan skema Dana Perimbangan agar semakin efektif dan efisien. Hal ini ditunjukkan oleh:

1. Penyempurnaan pengalokasian Dana Alokasi Khusus untuk program pembangunan yang merupakan prioritas nasional dan bersifat kritis bagi pengembangan daerah. Tabel 3.1 menunjukkan perkembangan program-program yang didanai DAK dari tahun ke tahun. Dalam tabel tersebut ditunjukkan bahwa sejak tahun 2011, pengembangan infrastruktur menjadi perhatian pemerintah pusat, mengingat besarnya ketimpangan kualitas infrastruktur antar daerah yang berdampak pada ketimpangan pembangunan horizontal.



**Tabel 3.1. Program-program yang Didanai oleh Dana Alokasi Khusus**

No.	Program	2008	2009	2010	2011
1	Pendidikan	V	V	V	V
2	Kesehatan	V	V	V	V
3	Jalan	V	V	V	V
4	Irigasi	V	V	V	V
5	Air minum	-	V	V	V
6	Sanitasi	-	-	V	V
7.	Infrastruktur untuk pemerintahan	V	-	V	V
8.	Kelautan dan Perikanan	V	V	V	V
9.	Pertanian	V	V	V	V
10.	Lingkungan	-	V	V	V
11.	Keluarga Berencana	V	V	V	V
12.	Kehutanan	V	V	V	V
13.	Perdagangan	-	V	V	V
14.	Infrastruktur di daerah tertinggal	-	-	-	V
15.	Listrik di daerah pedesaan	-	-	-	V
16.	Perumahan	-	-	-	V
17.	Keamanan transportasi darat	-	-	-	V
18.	Infrastruktur di daerah pedesaan	-	V	V	V
19.	Infrastruktur di wilayah yang lebih luas	-	-	-	V

Sumber: Kementerian Keuangan, 2009, Bab II, hal. 81 dan 2011, Bab III, hal. 106-107.

2. Penghapusan unsur non-formula seperti *hold-harmless provision* dan belanja pegawai daerah secara bertahap dari penghitungan Dana Alokasi Umum, sehingga alokasi DAU akan lebih banyak ditentukan oleh formula DAU. Implikasinya adalah beban anggaran pemerintah pusat sebagai akibat adanya unsur non-formula dalam DAU berkurang.

Upaya ini berdampak pada APBN Pemerintah sebagaimana ditunjukkan oleh tren *budget-GDP ratio* yang cenderung fluktuatif. Pada periode 2007 - 2010, trend ini meningkat dari 1,3% pada tahun 2007 (Kementerian Keuangan, 2010, Bab II, hal. 50), menjadi 2,1% pada tahun 2010 (Kementerian Keuangan, 2011, Bab II, hal. 58) dan pada tahun 2012, rasio tersebut mencapai angka 2,23% (Kementerian Keuangan, 2013, Bab II, hal. 54). Hal ini berkaitan dengan upaya pemerintah untuk terus menerus memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat sebagaimana dijelaskan di atas.

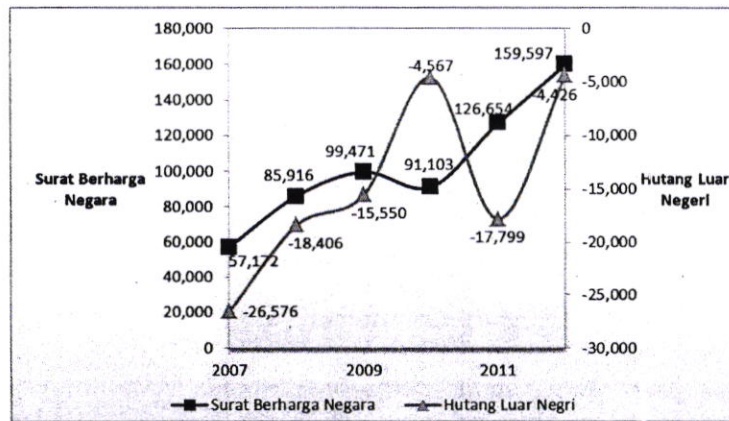
Untuk mengurangi defisit anggaran, pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri yang berasal dari penerimaan pendapatan pajak dan non-pajak. Peningkatan ini ditunjukkan oleh rasio penerimaan dalam negeri terhadap PDB yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007, rasio tersebut mencapai 17,87% dan pada tahun 2012 mencapai 32,70%.

Selanjutnya, defisit anggaran yang masih terjadi ditutupi oleh sumber pembiayaan atau utang dari dalam dan luar negeri. Peran pembiayaan dalam perekonomian Indonesia diukur dengan menggunakan indikator *debt-GDP ratio*. Sebagai upaya penurunan rasio tersebut, pemerintah mengambil langkah untuk menurunkan stok pinjaman luar negeri melalui, antara lain:



1. Peningkatan sumber pembiayaan dalam negeri yang lebih tinggi dari waktu-ke waktu. Sumber ini berasal dari perbankan dalam negeri dan non-perbankan dalam negeri. Salah satu unsur penyumbang terbesar pembiayaan dalam negeri yang bersumber dari non-perbankan dalam negeri adalah Surat Berharga Negara (SBN). Grafik 3.2 menunjukkan posisi SBN yang terus meningkat (angka dalam milyar Rupiah).

**Grafik 3.2. Perkembangan Surat Berharga Negara dan Utang Luar Negeri (dalam Milyar Rupiah)**



Sumber: Kementerian Keuangan, 2013

2. Pengelolaan utang luar negeri yang lebih baik melalui fleksibilitas pembiayaan utang. Fleksibilitas ini dijabarkan dalam bentuk perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang tanpa menyebabkan perubahan pada total pembiayaan utang. Perubahan tersebut meliputi perubahan penerbitan SBN yang memungkinkan untuk melebihi atau mengurangi jumlah neto, penarikan pinjaman dalam negeri, dan/atau penarikan pinjaman luar negeri (Kementerian Keuangan, 2013, hal. 40).

Adanya alternatif instrumen utang memberikan jaminan atas ketersediaan dana terutama pada saat pasar keuangan internasional mengenakan bunga pinjaman yang tinggi atau dana internasional tidak tersedia. Pengelolaan utang luar negeri yang lebih baik ditunjukkan dengan nilai *negative net borrowing* yang semakin kecil sebagaimana ditunjukkan dalam Grafik 3.2 di atas.

Pengelolaan utang yang lebih baik ditandai dengan penurunan *debt-GDP ratio* dari 35.2% pada tahun 2007 menjadi 26.1% pada tahun 2010 dan 23.2% pada tahun 2012 (Kementerian Keuangan, 2013, Bab 6, hal. 21). Pemerintah menargetkan rasio tersebut pada tingkat 19% pada akhir tahun 2015 (Kementerian Keuangan, 2012, Bab 7, hal. 45).

## VI. Kesimpulan dan Rekomendasi

Pemerintah telah berupaya untuk memenuhi komitmennya sebagai negara anggota G20 dalam pengelolaan anggaran dan utang yang lebih baik. Upaya ini ditunjukkan melalui: (1) penghematan belanja (seperti konversi BBM dan pengurangan subsidi untuk BBM kendaraan bermotor, TDL dan bantuan sosial), (2) pengalihan dana subsidi untuk program lain dan (3) penyempurnaan perumusan Dana Perimbangan yang dibarengi dengan (4) upaya peningkatan penerimaan dalam negeri dan (5) pengelolaan utang yang lebih baik terutama dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri.

Walaupun demikian, upaya ini belum memberikan hasil yang diharapkan sebagaimana ditunjukkan oleh posisi Indonesia di peringkat 17



menurut indikator *deficit budget-GDP ratio* dan *debt-GDP ratio*. Sementara trend *debt-GDP ratio* cenderung menurun karena pengelolaan utang yang lebih baik, *deficit budget-GDP ratio* cenderung meningkat. Adanya peningkatan *deficit budget-GDP ratio* terutama disebabkan oleh upaya pemerintah untuk terus menerus mendorong aspek pemerataan dan pengentasan kemiskinan sebagai akibat krisis ekonomi global pada tahun 2008-2009.

Berdasarkan kondisi di atas, pengurangan subsidi secara bertahap, peningkatan penerimaan dalam negeri melalui pajak dan pengelolaan utang yang semakin baik merupakan langkah yang sudah tepat. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi tekanan pada APBN dalam jangka panjang tanpa harus mengorbankan tingkat kesejahteraan masyarakat.

#### Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik, n.d<sup>3</sup>. *Number and percentage of poor people, poverty line, poverty gap index, poverty severity index by province*, akses 14 Mei 2013, URL: [http://www.bps.go.id/eng/tab\\_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=23&notab=1](http://www.bps.go.id/eng/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=23&notab=1)
- Bank Indonesia. (2012). *Statistik Utang Luar Negeri Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia.
- Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral. (2010). *Konversi minyak tanah ke LPG menggerakkan perekonomian menghemat energi*. Akses, 14 Mei 2013, URL: <http://www.esdm.go.id/berita/artikel/56-artikel/4011-konversiminyak-tanah-ke-lpg-menggerakkan-perekonomian-menghemat-energi.html>

Kementerian Keuangan RI. (2005). *Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2005*. Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI, Jakarta.

Kementerian Keuangan RI. (2010). *Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2010*. Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI, Jakarta

Kementerian Keuangan RI. (2011) *Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2011*. Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI, Jakarta.

Kementerian Keuangan RI. (2012). *Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2012*. Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI, Jakarta.

Kementerian Keuangan RI (2013). *Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2013*. Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI, Jakarta.